

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan keberagaman maupun hasil kekayaan alam dan lainnya. Atas potensi tersebut banyak negara yang tertarik untuk menjalin kerjasama dengan Indonesia, salah satunya adalah negara China. China merupakan negara yang penduduknya terpadat di dunia, sedangkan Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar ke-4 di dunia. Agar dapat menjalin hubungan kerjasama antara kedua negara maka kedua negara harus melakukan perdagangan internasional, investasi atau penanaman modal asing baik dalam aspek barang dan jasa. Dengan adanya kerjasama internasional baik perdagangan dan penanaman modal asing maka perekonomian bagi setiap negara yang ada di dunia akan saling tercipta dan terjalin antara satu negara dengan negara lainnya. Kerjasama internasional pada zaman yang serba cepat ini secara tidak langsung mendorong terjadinya globalisasi. Globalisasi ini terjadi seiring berkembangnya zaman ditandai dengan berkembangnya inovasi baru mengenai teknologi informasi, politik, keuangan, perdagangan serta investasi. Ini merupakan salah satu modal yang penting bagi suatu negara untuk menarik investor agar mau masuk dan berinvestasi di dalam negeri. Hubungan kerjasama ini dapat terjalin apabila mendapat dukungan baik dari berbagai sisi baik dari aspek ekonomi, politik, sosial, budaya dan lingkungan.

Intensitas Kerjasama antara Indonesia dan China merupakan hasil dari kerjasama strategis yang diawali dengan momentum penandatanganan *Join Declaration*

between the Republic of Indonesia and the People's Republic of China on Strategic Partnership. Deklarasi ini ditandatangani oleh kedua kepala negara yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dan Hu Jintao pada tanggal 25 April 2005 di Jakarta. Tujuan dari Kerjasama ini terdiri dari empat hal yakni: 1) untuk memperkuat Kerjasama politik dan keamanan, 2) memperdalam Kerjasama ekonomi dan pembangunan, 3) meningkatkan kerjasama sosial budaya, 4) dan memperluas hubungan non-pemerintah (Kementerian Luar Negeri RI, 2010). Hal ini membuktikan bahwa hubungan antara Indonesia dan China tidak selalu berjalan mulus terkait dinamika geopolitik yang melingkupinya.

Hubungan Indonesia dan China (RRC) telah terjalin sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno. Indonesia secara resmi mengakui kedaulatan China pada tanggal 15 Januari 1950 (Sukma, 1999). Ditandai dengan pengiriman Wang Renshu sebagai Duta Besar China yang pertama di Indonesia pada Juli 1950 (Muas, 2009). Kemudian, ditindaklanjuti dengan pengiriman Arnold Mononutu sebagai Duta Besar Republik Indonesia ke Beijing pada tahun 1953. Hal ini menandai awal keeratan hubungan antara kedua negara.

Namun pasca terjadinya peristiwa G30S/PKI, Indonesia menilai bahwa China yang komunis telah ikut campur dalam peristiwa pemberontakan tersebut. Hingga kemudian Indonesia melakukan pembekuan hubungan bilateral dan perdagangan dengan China pada Oktober 1967, ketika Indonesia telah bertransisi menjadi di bawah pemerintahan Presiden Soeharto (Sukma, 1999). Hal ini mengakibatkan kerenggangan hubungan antara kedua negara dalam beberapa waktu. Kemudian, pada tahun 1990 upaya normalisasi hubungan antara kedua negara kembali dilakukan guna memperluas pasar ekspor non-migas Indonesia.

Saat BJ Habibie menjabat sebagai Presiden di awal reformasi, ia menandai demokratisasi antara lain dengan menerbitkan Instruksi Presiden terkait penghapusan sejumlah peraturan yang dianggap mendiskriminasi Etnis Tionghoa di Indonesia (Muas, 2009). Kemudian dilanjutkan oleh Abdurrahman Wahid, yang setelah terpilihnya sebagai presiden melakukan kunjungan resmi kenegaraan yang pertama kalinya ke China pada tanggal 1-3 Desember 1999. Hal ini semakin meningkatkan hubungan diplomatic antara Indonesia dan China.

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, kerjasama antara Indonesia dan China terus berkembang. Ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman untuk pembentukan forum energi kedua negara pada tanggal 24 Maret 2002 (Muas,2009). Selain itu, pada November tahun 2001 Indonesia ikut menyepakati pembentukan *ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)-China Free Trade Area (ACFTA)* Kerjasama ini juga semakin meningkatkan hubungan antara Indonesia dan China. Dimana terjadi peningkatan jumlah investasi China di Indonesia (diluar investasi sektor minyak dan gas bumi) dari 6 juta USD pada tahun 2002 menjadi 83,2 juta USD pada tahun 2003 (Ragimun,2011).

Seiring dengan kemajuan ekonomi China, berbagai kerjasama dengan beberapa negara di kawasan lainnya semakin terus dilakukan, khususnya di kawasan seperti Amerika Latin, Afrika dan Asia Tenggara. Hal ini memberikan peluang bagi pengusaha China untuk memperluas pasarnya hingga ke luar negeri dan memperluas aktivitas produksi pada lokasi-lokasi yang strategis. Selain itu, para pengusaha China dapat membangun jaringan langsung di pasar-pasar utama luar negeri (Gammeltoft & Tarmidi, 2011). Perubahan kebijakan pemerintahan

China ini, berkaitan dengan restrukturisasi ekonomi China dari sistem perencanaan pusat yang tertutup menjadi sistem perekonomian yang berorientasi pasar.

Dengan populasi dan kekayaan sumber daya alam yang besar, Indonesia menjadi salah satu negara tujuan yang menarik bagi investasi di kawasan Asia Tenggara. Indonesia memiliki sumber daya manusia terpadat keempat di dunia (Worldpopulationreview, 2016). Kemudian, GDP Indonesia menempati peringkat ke 16 besar di dunia dengan USD 932,259 juta (worldbank.org, 2016). Meski pendapatan per kapita masih relatif rendah, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat dianggap sangat menjanjikan sebagai pasar China. Selain itu, Indonesia memiliki potensi kemajuan ekonomi yang besar karena pengaruh geostrategis yang terletak di jalur Selat Malaka, yang merupakan rute perdagangan tercepat dari Samudera Hindia menuju Samudera Pasifik. Hal ini mengakibatkan jalur Selat Malaka menjadi salah satu jalur laut tersibuk di dunia.

Kinerja perekonomian suatu negara bisa dilihat dari indikator-indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat harga, dan pengangguran. Kinerja ekonomi Indonesia juga bisa dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi antar waktu. Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang terus mengalami pertumbuhan ekonomi pada tingkat rata-rata yang moderat (sekitar 5 sampai dengan 7 persen). Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan bisa mencapai pertumbuhan ekonomi *steady state* dalam waktu lebih cepat dan peningkatan yang sangat drastis seperti yang terjadi di tahun 2000

Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan berkelanjutan merupakan penjabaran keberhasilan pembangunan ekonomi. Menurut Todaro dalam Jenicek

(2016), pembangunan ekonomi dicapai sebagai sebuah proses multidimensi yang melibatkan perubahan yang besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, kelembagaan nasional, percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan dalam ketimpangan, dan juga pengurangan dalam kemiskinan. Pembangunan harus merepresentasikan perubahan dalam semua sistem sosial dan juga kelompok sosial dalam masyarakat.

Sebagai sebuah negara berkembang, Indonesia telah tergolong sebagai negara industri baru (*Newly Industrialized Countries*). Perubahan menuju negara industri baru (NICs) dibarengi dengan perubahan dalam output (PDB) sebagai salah satu indikator ekonomi makro. Di samping adanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, standard hidup juga terus mengalami perbaikan.

Capaian ekonomi lainnya juga menunjukkan bahwa Indonesia telah sukses dalam hal pembangunan ekonomi. Keberhasilan ini terlepas dari masalah krisis ekonomi tahun 1998 yang bukan hanya disebabkan oleh *internal mismanagement* atau kegagalan kebijakan, namun juga *contagion effects* dari Thailand.

Menurut Adiningsih (2005), perekonomian Indonesia telah bergerak dengan arah yang tepat sejak tahun 2000 atau dua tahun setelah krisis ekonomi 1998. Sejak itu, Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang moderat dan stabil. Bersamaan dengan performa ekonomi yang makin bagus, Indonesia secara pelan-pelan bisa keluar dari skema pinjaman IMF pada akhir tahun 2003. Dalam hal politik dan pemerintahan, proses demokrasi dengan pemilihan umum langsung memberikan indikasi yang positif bagi pasar dan mendorong keyakinan bisnis yang lebih baik. Pemerintahan baru pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

telah memberikan prioritas pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan penciptaan lapangan kerja melalui investasi. Kebijakan tersebut dilakukan bersamaan dengan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan penguatan keamanan.

Menurut Salvatore (2014) mengatakan bahwa ekspor, impor, dan investasi merupakan kegiatan yang termasuk dalam perdagangan internasional yang melibatkan dua atau lebih negara. Sedangkan kegiatan investasi dalam perdagangan internasional dapat diartikan sebagai investasi portofolio atau juga termasuk *Foreign Direct Investment* yang menurut Krugman dan Obsfeld dalam Kuswantoro (2016) artinya mendirikan anak perusahaan di wilayah lain atau bahkan mengakuisisi perusahaan di negara tujuan.

Mengacu pada teori pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan oleh Robert Solow dengan pendekatan Neo-Klasik, pembentukan modal dan pertumbuhan penduduk merupakan factor yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam hal pembentukan modal, peranan investasi baik domestik maupun asing melalui investasi asing langsung (FDI) memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, FDI, modal dan tenaga kerja merupakan faktor-faktor yang penting dalam proses pertumbuhan ekonomi.

Teori pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan oleh kaum Neo-Klasik menekankan peranan modal yang dimiliki suatu negara. Modal yang bersumber dari dalam negeri atau yang juga dikenal dengan nama Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dianggap mampu mendorong perekonomian suatu negara berkembang

dengan sangat baik, dimana jika investasi yang terjadi di dalam negeri mengalami peningkatan maka akan pertumbuhan ekonomi.

Bagi Indonesia, disamping investasi domestik FDI memiliki peranan yang besar dalam melengkapi kebutuhan investasi dalam negeri. FDI meningkatkan kemampuan produksi dan menjadi media transfer teknologi dari luar negeri ke dalam negeri. Dalam hal produksi, FDI bisa meningkatkan produktivitas perusahaan dalam negeri dengan transfer teknologi yang dibawa bersamaan dengan masuknya FDI. Kehadiran investasi asing dalam bentuk FDI juga bisa meningkatkan daya saing dan keunggulan produk domestik.

Menurut Athukorala (2003), penanaman modal asing memberikan dampak positif terhadap perekonomian negara tuan rumah karena melalui penanaman modal asing bisa menambah ketersediaan dana bagi negara tuan rumah (*recipient country*). Athukorala juga melakukan penelitian dengan menggunakan model ekonometrika kointegrasi dan data seri waktu 1959 sampai dengan 2012 untuk menganalisa hubungan antara FDI dengan PDB di Sri Lanka. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa FDI memiliki efek positif terhadap PDB dan adanya hubungan kausalitas antara FDI dan GDP di Sri Lanka.

Lipsey (2000) juga menemukan bahwa arus investasi asing langsung (FDI) memberikan dampak yang positif bagi tuan rumah. Namun hasil penelitian tidak menemukan adanya hubungan yang signifikan antara FDI dengan pertumbuhan ekonomi terutama bagi negara sedang berkembang.

Total investasi asing dalam negeri baik pemerintah maupun swasta merupakan salah satu variable dalam perhitungan pendapatan nasional yang

menjadi tolak ukur pertumbuhan ekonomi, karena itu investasi seharusnya dijaga kestabilan perkembangannya dan terus diupayakan untuk meningkat.

Hubungan bilateral Indonesia dan China mengalami kemajuan pesat dengan peningkatan kerja sama menjadi daya tarik kedua negara, baik untuk kepentingan perdagangan, investasi, pariwisata, pendidikan maupun budaya. Dengan semakin meningkatnya arus lalu lintas manusia dari kedua negara, diperlukan pengelolaan dan kerja sama yang baik antara kedua negara. Mekanisme bilateral yang telah terbangun di berbagai bidang dan tingkatan kiranya akan mampu menamung dinamika tersebut, disertai harapan bahwa setiap permasalahan harapan bahwa setiap permasalahan yang muncul dapat diselesaikan melalui cara-cara damai, sederajat dan saling menguntungkan. Sementara itu, hubungan ekonomi Indonesia dengan Cina sebagai mitra dagang utama dan sumber investasi potensial diwarnai dengan upaya Pemerintah Indonesia mendorong investasi China pada proyek *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)* di Indonesia dan upaya kedua negara memajukan liberalisasi ekonomi untuk akses bagi produk-produk Indonesia ke China dan begitu juga sebaliknya.

Berbagai bentuk investasi dan penggelontoran dana yang dilakukan oleh China kemudian digunakan untuk beragam proyek pembangunan di Indonesia. Beberapa mega proyek hasil dari kerjasama Indonesia dan China antara lain yaitu (1) Kerja sama Indonesia dengan China Harbour dalam pemasangan rel LRT untuk dua perlintasan kereta api sepanjang 46,8 km; (2) Pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), (3) Pembangunan Tol Manado-Bitung, dan (4) beberapa proyek di Sumatera Utara

Kerjasama Indonesia dan China dalam proyek infrastruktur sudah tidak diragukan lagi. Keduanya memang telah memfokuskan kebijakan luar negeri masing-masing di sektor infrastruktur. Terlebih lagi, China dikenal dengan negara yang mengimplementasikan industrialisasi secara masif. Dalam proyek *Light Rail Transit* (LRT) wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, Pemerintah Indonesia menjalin kerjasama dengan Pemerintah China untuk berbagai sistem perkeretaapian. Untuk sistem telekomunikasi diakomodir oleh Huawei Tech Investment, *platform screen door system* diakomodir oleh China Camc Engineering Co. LTD dan China Railway Construction Cooperation.

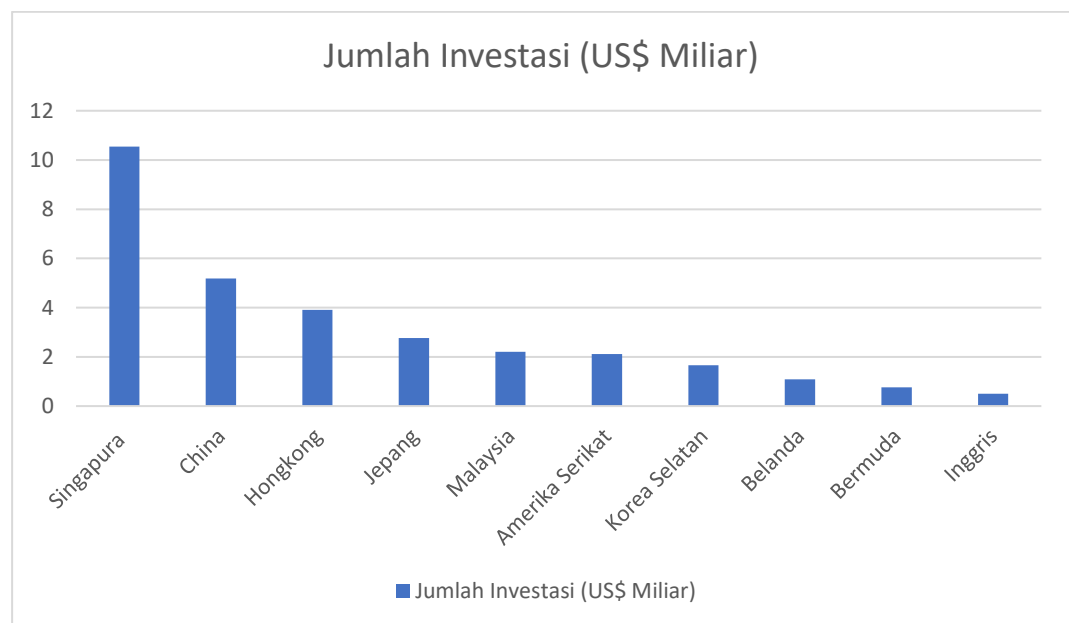


Diagram 1.1 Realisasi PMA sepanjang tahun 2022

Sumber : BKPM (2023)

Menurut data yang diambil dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) di Indonesia mencapai

US\$33,39 miliar sepanjang tahun 2022. Realisasi investasi asing terbesar berasal dari Singapura, yakni US\$10,54 miliar atau 31,56% dari total PMA tahun lalu. China menempati peringkat kedua dengan realisasi PMA US\$3,91 miliar, dan Jepang US\$2,76 miliar.



Tabel 1..2 Jumlah Investasi Negara China dari tahun 2006-2021

Sumber : BKPM (2023)

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2021 investasi China mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun.

Masuknya penanaman modal asing dan investasi dari negara China memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Dengan berbagai penanaman modal yang digelontorkan oleh negara China di berbagai sektor memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mengembangkan berbagai proyek strategis yang dapat menggerakkan roda perekonomian negara Indonesia. Selain itu data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa total

nilai investasi yang berasal dari China di Indonesia sejak tahun 2010 hingga 2021 mencapai US\$ 31,5 miliar. Berikut adalah rincian jumlah investasi China di beberapa sektor di Indonesia

1. Sektor energi: Investasi China di sektor energi mencapai US\$ 17,3 miliar, yang meliputi investasi di bidang minyak dan gas, pembangkit listrik, dan tambang batubara.
2. Sektor transportasi: Investasi China di sektor transportasi mencapai US\$ 10,7 miliar, yang meliputi investasi di bidang jalan tol, Pelabuhan, kereta api, dan bandara.
3. Sektor manufaktur: Investasi China di sektor manufaktur mencapai US\$ 2,5 miliar, yang meliputi investasi di bidang industri baja, industri kertas, dan industry tekstil.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan penulis diatas. Maka penulis melakukan penelitian berjudul **“PENGARUH INVESTASI CHINA TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO NEGARA INDONESIA DENGAN UJI KAUSALITAS GRANGER**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang tertera diatas maka dapat ditarik rumusan masalah berikut yaitu:

1. Apakah terdapat hubungan jangka panjang dan jangka pendek antara produk domestik bruto di Indonesia dan nilai investasi?
2. Apakah terdapat hubungan kausalitas antara produk domestik bruto di Indonesia dan nilai investasi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yang sesuai dengan rumusan masalah adalah:

1. Menganalisis hubungan jangka panjang dan jangka pendek antara produk domestik bruto di Indonesia dan nilai investasi.
2. Menganalisis hubungan kausalitas antara produk domestik bruto di Indonesia dengan nilai investasi.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini membahas mengenai hubungan jangka panjang dan jangka pendek dan hubungan kausalitas antara produk domestik bruto di Indonesia dan nilai investasi dari 2006-2022.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat-manfaat yang diharapkan dari penulisan penelitian ini adalah:

- a) Manfaat Teoritis
 1. Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi
 2. Memperkaya referensi dan literatur mengenai nilai investasi, dan *Gross Domestic Product*.
 3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan terhadap penelitian selanjutnya.

b) Manfaat Praktis

1. Sebagai salah satu syarat penulis untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
2. Memberikan bahan dan sumbangan pemikiran untuk mengevaluasi dan selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam penyusunan suatu kebijakan
3. Memperkaya wacana Pustaka bagi akademika Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan mahasiswa/I, khususnya mengenai masalah nilai investasi, dan *Gross Domestic Product*.